



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PAPIUA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAYAPURA

Jalan. Raya Seritani – Depapre No.50 Watisu Kabupaten Jayapura

Laman : lhjayapura.kemankumham.go.id Surel : lh.jayapura@kemankumham.go.id

Jayapura, 05 Januari 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua
Cq. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
Di
Jayapura

SURAT PENGANTAR
NOMOR : W.30.EK.PR.04.04-01

No.	Naskah Dinas yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Pengiriman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Lembaga Pemasyrakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura	1 (Satu) Rangkap	Dikirim untuk menjadi peniksa



Kepala Lembaga Pemasyrakatan
Narkotika Kelas IIA Jayapura



Samaludin Bogra
NIP. 196612161993031001

Tembusan Yth :

1. Kepala Divisi Pemasyrakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua di Jayapura
2. Arsip



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KELAS IIA JAYAPURA



Jalan Raya Sentani Depapre No. 90
Waibu, Kabupaten Jayapura

lprjayapura.kemenkumham.go.id

TAHUN
2023

KATA PENGANTAR



Segala Puj Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan anugerahNya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Jayapura selama tahun 2023 dapat tersusun dengan baik dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja instansi merupakan tampilan dari kinerja organisasi yang meliputi Rencana kerja tahunan, Perjanjian kinerja, Laporan Kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja serta tampilan dari kinerja keuangan yang meliputi rencana kerja anggaran, DIPA, laporan keuangan, dan audit keuangan. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Serta merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang merupakan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah.

Tujuan pelaporan kinerja yakni memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemben mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dan fungsi laporan kinerja adalah sebagai media hubungan kerja organisasi, media akuntabilitas, media informasi, umpan balik perbaikan kinerja.

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Jayapura telah mengalami perkembangan dalam Pencapaian Tujuan, khususnya dalam rangka penegakan Hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Namun masih terdapat permasalahan yang harus dihadapi, tetapi karena komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Jayapura, pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang diinginkan. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Jayapura dapat bermanfaat bagi Kepentingan Bangsa dan Negara.



Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat merupakan Umpan Balik dalam Peningkatan Keberhasilan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan dimasa mendatang dengan harapan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan Bimbingan dan Pelunjuk dalam melaksanakan Tugas dan Pengabdian terhadap Bangsa dan Negara.



Jayapura, 05 Januari 2024

Kepala



Samaludin Bogra

NIP. 196612161993031001



IKTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan Good Governance kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Laporan Kinerja yang diharapkan tidak hanya Pemerintah kepada Masyarakat tetapi juga Laporan Kinerja kepada Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura yang berada dalam lingkungan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagai bentuk implementasi dan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan gambaran tentang kinerja dari penyelenggaraan instansi pemerintah pada tahun 2023, yang di tunjukkan dalam rincian laporan hasil kinerja yang dirangkum pada setiap seksi dan subseksi pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang sudah ditandatangani. Hal ini dikarenakan setiap seksi struktur organisasi dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Setiap unit pelaksana dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura Tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Strategi Kementerian/Lembaga yang memuat sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01/PR.03/TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Demikian ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura disusun, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi pembangunan daerah dan negara menuju tata kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).

Jayapura, 05 Februari 2024

Kepala



Paikidin Bogra

NIP. 196812161993031001



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii-iii
IKTISAR EKSEKUTIF	iv-v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Aspek Strategis	4
E. Isu Strategis	5
F. Sistematika Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura	17
B. Realisasi Anggaran	25
C. Capaian Kinerja Anggaran	26
D. Capaian Kinerja lainnya	26
BAB IV PENUTUP	29
A. Kesimpulan	29
B. Saran	30
LAMPIRAN	31



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Tervujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura Tahun 2023 yang

dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA NARKOTIKA KELAS IIA JAYAPURA

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05 OT/01/01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, melaksanakan fungsi sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah.

Dalam hal pengorganisasian, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura terdiri dari lima Seksi antara lain *Sub-Bagian Tata Usaha* mempunyai tugas Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ke Tata Usahaan, Kepegawaian, Keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif, *Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik* mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi statistik, dokumentasi, pembinaan mental / rohani dan fisik serta perawatan Kesehatan Narapidana / Anak Didik sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemasyarakatan, *Seksi Kegiatan Kerja* mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan kerja dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja serta mengelola hasil kegiatan kerja dari Narapidana / Anak Didik, *Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib* mempunyai tugas menkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib dengan mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam rangka terciptanya suasana aman dan tertib di lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura.

Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura.

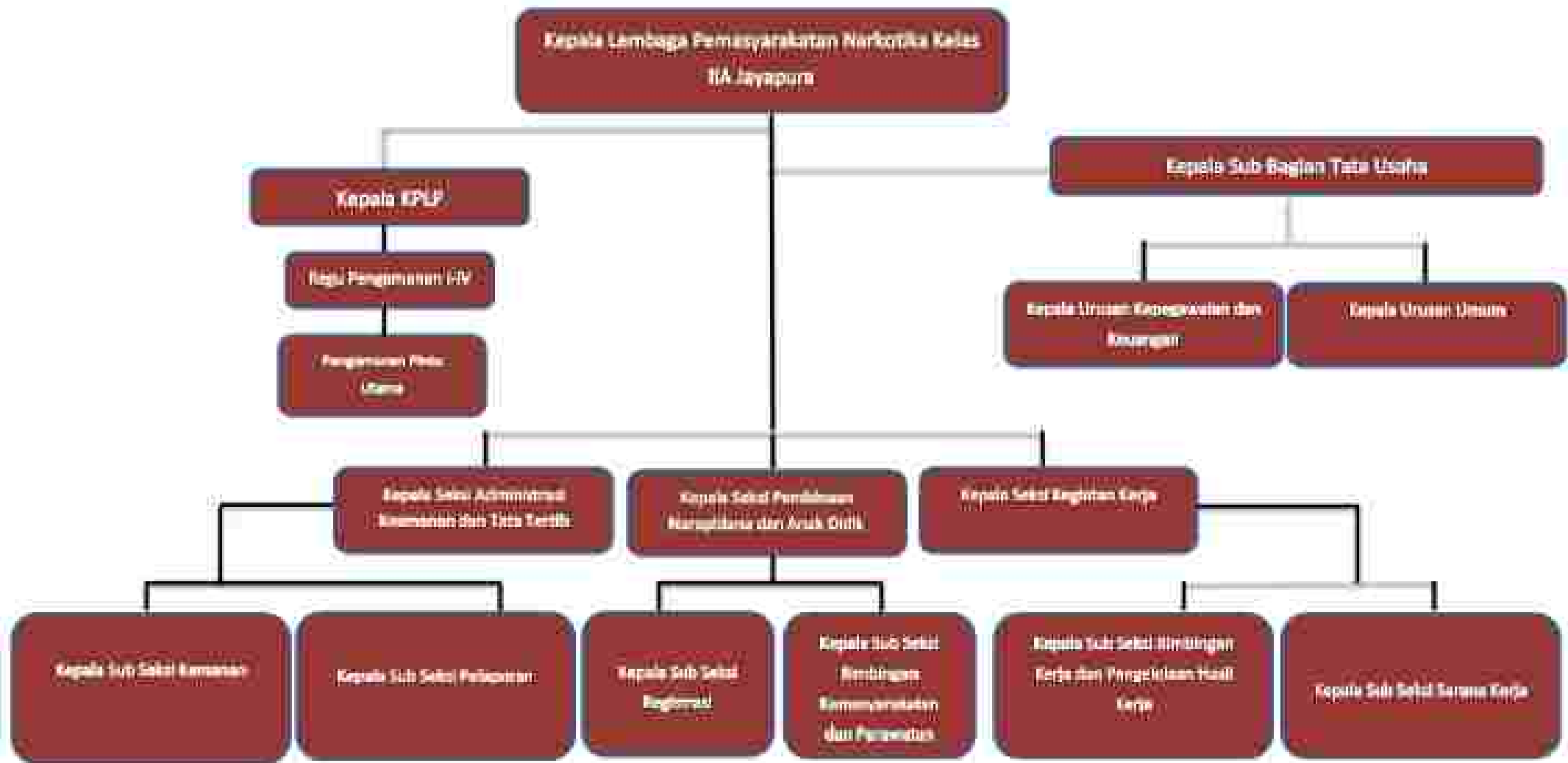
Dalam melaksanakan peran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khususnya pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura menjadi sangat penting dan strategis sejalan dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan serta berdasarkan surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B-98/1/MENPAN/2/85 Tanggal 2 Februari 1985, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura menjadi semakin sangat penting, sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan susunan secara organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura yang secara substansif menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, terdiri dari :

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak	melakukan pembinaan narapidana/anak didik
	Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
	Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik
	Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
	Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAYAPURA**



Struktur Organisasi	
Bagian Tata Usaha	<p>1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Deni Zora Artami. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas ke: Tata Usahaan, Kepegawaian, Keuangan, perlengkapan dan rumah tangga sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka pelayanan administratif.</p> <p>Bagian Tata Usaha Terdiri dari 2 bagian, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Urusan Umum : Baby Diana Sapuleta, S. Sos Melakukan urusan tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIA Jayapura sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 2. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan : Oktovina Tapatkeding, Amd.Kom Melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Lepas.
Bimbingan Narapidana/Anak Didik	<p>2. Kasi Bimbingan Napi / Anak Didik : Adhi Nugroho Utomo, S.Sos Memberikan bimbingan Napi dan Anak Didik berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan Napi/Anak Didik kembali ke Masyarakat tidak melanggar hukum lagi dan baik.</p> <p>Bagian Bimbingan Napi / Anak Didik terdiri dari 2 bagian :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Bidang Registrasi : Muh. Subchan, S.H. Melakukan dan membuat pendataan statistik dan dokumentasi/ anak didik LAPAS sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana / anak Didik : Nursriyati, S.H. Menyalenggarakan pembinaan mental / rohani dan fisik serta meningkatkan pengetahuan Asimilasi serta perawatan Narapidana/ Anak didik sesuai peraturan

		yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas masyarakatan, melaksanakan program rehabilitasi kepada 60 orang WBE.
Seksi Kerja	Kegiatan	<p>3. Kepala Seksi Kegiatan Kerja : Sumaji, S.H.</p> <p>Mengkordinasikan menyiapkan pelaksanaan bimbingan Latihan kerja, serta mengelola hasil kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan Narapidana/Anak Didik sebagai bekal apabila Kembali ke masyarakat.</p> <p>Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari 2 bagian yaitu :</p> <p>a. <i>Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja : Andri Irianto.</i></p> <p>Memberikan bimbingan dan petunjuk kerja serta mengelola hasil Kerja sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan keterampilan kepada Narapidana/Anak Didik dalam lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura.</p> <p>b. <i>Sub Seksi Sarana Kerja : Fitriah Kadir, S.H</i></p> <p>Memperiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas sarana/prasarana peralatan kerja berdasarkan kebutuhan dalam rangka pembinaan Narapidana dan Anak Didik.</p>
Administrasi Keamanan Dan Tata Tertib		<p>4. Kepala Seksi Administrasi Keamanan Dan Tata Tertib : Irwanto Talantan, S.H. Mengkordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib, mengatur jadwal tugas, dan penggunaan perlengkapan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura.</p> <p>Bagian Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari 2 bagian, yaitu :</p> <p>a. <i>Sub Seksi Keamanan : Irianto Malong, SH.</i></p> <p>Menyelenggarakan tugas pengamanan dan</p>

	<p>keterlibatan mengatur/membuat jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan pengamanan sesuai peraturan dan petunjuk yang berlaku agar tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.</p> <p>b. Sub Bagian Pelaporan dan Tata Tertib : Yamanto Pasulle S.H. Membuat laporan keamanan dan keterlibatan berdasarkan data dan berita acara dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.</p> <p>5. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan : Feleks Kusaly, S.H.,M.H Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan pengamanan dan keterlibatan sesuai jadwal jaga tugas terhadap keamanan dan keterlibatan di lingkungan Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura</p>
--	---

Bagan Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Golongan			Tingkat Pendidikan			
		L	P	II	III	IV	SMA	D3	S1	S2
1.	Ka. Lapas	1				1			1	
2.	Sub Bagian Tata Usaha	5	4	6	3		6		3	1
3.	Bimbingan Narapidana/Anak Didik	6	6	3	9		3			
4.	Kegiatan Kerja	5	1	2	4		3		3	
5.	Administrasi Keamanan dan Tata Tertib	6	1	3	4		3		4	
6.	Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan	46	3	43	3		43		3	1

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Aspek Strategis dalam suatu organisasi berhubungan dengan sebagaimana organisasi menganalisa sasaran strategis (Visi, Misi, dan Tujuan) pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura dengan kondisi internal dan eksternal yang dihadapi untuk menentukan kebijakan dalam pembuatan program dan kegiatan, agar sejalan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.

E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura selama tahun 2023, terdapat isu atau permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja, antara lain:

1. Sarana dan Prasarana dalam menunjang kinerja dan SDM pada beberapa seksi belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pegawai seperti, Meja dan Kursi, PC/Laptop pada ruangan staf;
2. Website Lapas Narkotika Jayapura belum bisa diakses;
3. Sarana dan Prasarana pada seksi pengamanan atau fasilitas yang menunjang kinerja pengamanan belum sesuai standar;
4. Penatausahaan BMN pada Lapas Narkotika Jayapura mengalami kendala dikarenakan ada barang hilang atau rusak;
5. Website Survey Pelayanan belum bisa diakses;

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura Tahun 2023.

RINGKASAN IKHTISAR EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan laporan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura Tahun 2023.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura Tahun 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB IV

PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2023 serta upaya / strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2024.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian atau Lembaga yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan bersifat indikatif. Renstra merupakan platform Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM atas Pelaksanaan visi dan misi kementerian hukum dan Ham dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif. Dalam kurun waktu 2020-2024 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (Lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi. Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIa Jayapura melaksanakan pembinaan dan perencanaan dibidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, hukum, hubungan antar Lembaga dan masyarakat, dan administrasi serta koordinasi terhadap pelaksanaan kerja.

Dalam rangka mendukung pencapaian rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, serta untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIa Jayapura mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pelaksanaan fungsinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIa Jayapura telah menetapkan arah dan kebijakan serta strategi sebagai berikut:

1. Pengustaran struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai analisis beban kerja sehingga terwujud organisasi yang *Right Sizing* dan *Right Function*.
Strategi:

Penyempurnaan organisasi dan tatakerja Lembaga Pemasyarakatan dengan menyatukan fungsi-fungsi yang sejenis dalam satu unit organisasi serta membentuk organisasi baru dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis Lembaga Pemasyarakatan.

2. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang mendukung pencapaian prioritas Lembaga Pemasyarakatan.

Strategi:

Penyempurnaan pola kerja dan mekanisme kerja dalam mendukung pembiasaan dan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3. Peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Strategi:

Penyusunan metode kerja dan kerjasama pelaksanaan Reformasi Birokrasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.

4. Pengelolaan Sumberdaya Manusia yang mendukung kapasitas dan kompetensi tugas dan fungsi.

Strategi:

Penyusunan analisa beban kerja dalam upaya mewujudkan pola promosi dan pola mutasi pegawai.

5. Pengelolaan berita dan informasi dalam rangka meningkatkan citra Kementerian.

Strategi:

- a. Meningkatkan kualitas informasi dan berita yang akurat dan up to date.
- b. Peningkatan kapasitas kehumasan dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik, dan menjadikan *one gate policy*.

dalam mempublikasikan berita dan informasi dari seluruh unit kerja.

6. Penataan keadan pengelolaan barang milik negara/aset negara yang tepat guna, tertib, akuntabel, transparan, profesional dan modern dengan mendapatkan *Good Governance*.

Strategi:

- a. Meningkatkan kualitas laporan pengelolaan aset yang akuntabel.
- b. Menyusun pemetaan kebutuhan.
- c. Penguatan Kelembagaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kemenkumham.

7. Penataan kebijakan pengelolaan data dan informasi yang mendukung peningkatan layanan berbasis teknologi.

Strategi:

- a. Pemetaan kebutuhan teknologi informasi masing-masing unit kerja.
- b. Penyusunan kebijakan pengelolaan sistem TI kementerian.

Tahun 2017 dilakukan evaluasi oleh Kemenpan-RB terhadap IKU Kementerian Hukum dan HAM. Hasil evaluasi tersebut terdapat beberapa penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM.

a.) Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Dasar

Dalam rangka pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura mempunyai peran penting dan strategis terutama dalam upaya mengembangkan sistem Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik yang profesional, efektif dan efisien yang merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam *good governance* sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan narapidana/anak didik, pemberian bimbingan, persiapan sarana dan mengelola hasil kerja pembinaan

sosial/kerohaniaan narapidana/anak didik melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS, serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Visi Misi Nilai-nilai Dasar dan Tujuan Lapas Narkotika Kelas IIa Jayapura, antara lain :

➤ **Visi**

Dukungan untuk Terapi, Kemanusiaan dan Kemitraan (Teraphy Support, Humanity, and Partnership)

➤ **Misi**

- a. Membangun kedisiplinan dan kebersamaan Petugas (*Discipline by Together Development for officer*);
- b. Program terapi untuk perubahan perilaku dan Pendidikan kepribadian (*Teraphy Program for Behavior Change and Personality Education*);
- c. Membangun kemitraan untuk keterbukaan peran masyarakat (*Partnership Development for Open Society Support*).

➤ **Motto Pelayanan**

"PASTI M A T O A"

- a. **Mudah** : Mudah dalam memberikan informasi terkait layanan (PB, CB, CMB) baik kepada Warga Binaan ataupun kepada Masyarakat;
- b. **Aman** : Menciptakan keadaan Aman, Tenang dan Bebas dari segala bentuk gangguan serta bahaya bagi Petugas maupun Warga Binaan;
- c. **Tertib** : Bersama-sama mematuhi tata tertib yang sudah ditetapkan, agar terciptanya Lapas yang ideal;
- d. **Obyektif** : Berfikir obyektif dan teguh pada pendirian dan tidak mudah Terpengaruh oleh apapun dan siapapun;
- e. **Amanah**: Berjanji untuk menjaga dan melindungi apa yang sudah diamanahkan Pada Kita serta melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

➤ **Nilai-nilai Dasar**

Untuk memandu pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai pedoman oleh setiap petugas pemasyarakatan dalam menetapkan keputusan. Nilai ini mendukung dan

memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun nilai-nilai dasar tersebut adalah :

1. Profesional

Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2. Akuntabel.

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.

4. Transparan.

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

B). PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dan pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepatan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang dievaluasi tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup Outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, serta merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Pencapaian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kehasilan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengantian Kinerja, Pelaporan kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input Output dan Outcome.

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya.
2. Output : segala sesuatu yang diterapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
3. Outcome : Indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung)

Pengukuran kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Pengukuran kinerja tahun 2023 merupakan realisasi dari rencana kinerja semester 2 tahun 2023 dan diperoleh angka realisasi dan persentase pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja outcome.

a.1. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	86
		2. Indeks Penuhunan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Permasalahan yang Aman dan Tertib		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perlakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kambuh yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kambuh	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kambuh secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpeuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	5 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	32 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	9 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	21 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 6.266.055.000,-
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 6.266.055.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.780.182.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 6.780.182.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAYAPURA

Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura merupakan kinerja secara kolektif dan seluruh sub bagian di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura. Pada Tahun 2023, Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.048.237.000 untuk mencapai target yang telah ditetapkan terhadap Indikator Kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja tersebut telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala. Pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala sudah dilakukan dalam aplikasi e-performance dengan alamat: <http://e-performance.kemankumham.go.id/>. Tampilan dashboard capaian Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura Tahun 2023 dalam sistem aplikasi e-performance terlihat pada gambar berikut :



Adapun rumus dalam capaian kinerja adalah :

$$\frac{\text{Realisasi Tahun 2023}}{\text{Target Capaian Tahun 2023}} \times 100\% = \dots$$

1). CAPAIAN KINERJA PER KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana/Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana sesuai dengan standar	80%	80	100
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	94	100
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	80	100
		4. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85%	85	100
		5. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan layanan Kesehatan sesuai standar	88%	88	100
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (dengan jumlah viralnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	80	100
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pebandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	27	100
<p>Analisa Capaian Kinerja Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana sesuai dengan standar (sudah mendapatkan sertifikat akreditasi) dan juga pembuatan depot air minum bagi WBP Pelayanan Kesehatan Lapas Narkotika Kelas II Jayapura telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura melalui PKM Waku. Tahun 2023 persentase Narapidana/Tahanan mendapatkan layanan Kesehatan (preventive) sebanyak 2032 layanan. Presentase TB Positif berjumlah 36 orang dengan rencana 1 orang resapan obat, 6 orang pengobatan fase lanjutan, 33 pengobatan awal dan sudah diterapi/diikuti di bok khusus TB. Jumlah HIV sebanyak 25 orang dan telah pun minum obat dengan kerjasama dengan RSUD Yowari Kabupaten Jayapura. Tahun 2023-Lapas Narkotika Jayapura sudah melaksanakan program rehabilitasi sosial yang diikuti oleh 40 orang WBP selama 3 Bulan.</p>					
2.	Meningkatnya Pelayanan	Persentase narapidana yang	70%	70	100

	Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Peningkatan Narapidana Resiko Tinggi.	memperoleh nilai baik dengan persentase memuaskan pada instrument penilaian kepribadian Persentase narapidana yang mendapatkan hak remis Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan vokasi bersertifikasi Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	89% 85% 88% 17% 31% 72%	89 85 85 17 31 72	100 100 100 100 100 100
<p>Analisa Capaian Kinerja Persentase peningkatan kesadaran dan kedisiplinan narapidana di tunda dengan banyaknya yang mendapatkan hak integrasi. Dengan rincai sebagai berikut: Asesitas Covid-19 : 9 Orang Hak remis dengan rincai yang mendapatkan remis sebagai berikut : Remis Khusus Natal : 402 orang Remis Khusus Idul Fitri : 88 orang Remis Umum : 490 orang Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi pada tahun 2023 sebanyak 40 orang WSP mengikuti pelatihan melalui bekerja sama dengan BUN Provinsi Papua</p>					
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Keteniban di Wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar Persentase gangguan kambuh yang dapat dicegah Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kambuh Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kambuh secara tuntas	88% 80% 85% 80%	85 80 85 80	100 100 100 100
<p>Analisa Capaian Kinerja Presentase pengaduan di tahun 2023 sudah dilaksanakan secara prosedur Meningkatkan pelayanan keamanan dan keteniban di Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura di tunda dengan deteksi dini gangguan kambuh dengan pengetahuan secara rutin dan kerjasama antara pihak TNI, POLRI, dan BUN</p>					
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Salkor	Terusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT, Pemasayarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu Terusunnya dokumen pengelolaan BMD dan Kermali tangaan Terperuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasayarakatan Terusunnya Dokumen	1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1	1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan	100 100 100 100

	Realisasikan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Layanan		
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
	Jumlah Kendaraan Bermotor	5 Unit	5 Unit	100
	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	32 Unit	32 Unit	100
	Jumlah Perakitan dan Fasilitas Perkantoran	9 Unit	9 Unit	100
	Jumlah Gedung/Bangunan	21 Unit		100
	Nilai IKPA	100	100	100
	Nilai SMART	100	100	100

Analisa Capaian Kinerja

1. Telah terlaksananya dokumen RENSTRA Lapsa Narkotika Kelas IIa Jayapura, beladioran anggaran dan Laporan bulanan umum telah tersusun dan dilaporkan tepat waktu.
2. Telah tersusunnya dokumen pengelolaan BMN berupa Laporan Semesteran dan BA bulanan BMN, pengesahan PSP serta ketersediaan barang dengan baik.
3. Sebanyak 2 orang pegawai sudah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pegawai. Mengkubestakan pegawai pada pada Ujian Kompetensi. Diklat E-learning maupun secara langsung di Badikat Surat
4. Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu standar dengan gaji tepat waktu.
5. Layanan perkantoran berjalan dengan lancar ditandai dengan sarana prasarana kebutuhan kantor telah tersedia sesuai SK.
6. Pencapaian Nilai IKPA : 100%
7. Pencapaian Nilai SMART : 100%

a. Perbandingan Realisasi Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2022	Capaian 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	95 %	100%	Target 2022 lebih kecil dari 2023
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi			
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar			

b. Permasalahan dan Keberhasilan

BAGIAN ORGANISASI	PERMASALAHAN	CAPAIAN TAHUN 2023
Bagian Urusan Tata Usaha		
Sub Bagian Tata Usaha	<p>1) Bidang Kepegawaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tingkat kehadiran pegawai kurang disiplin <p>2) Bidang Keuangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Minimnya anggaran untuk biaya Rawat Inap di Rumah sakit serta anggaran untuk obat-obatan Narapidana 	<ul style="list-style-type: none"> Pengusulan orang Kenaikan Pangkat, promosi jabatan berjalan lancar di akhir tahun. Realisasi Anggaran Tahun 2023 Belanja Pegawai : 99,67% Belanja Barang : 98,16% Nilai IKPA : 98,78% SMART : 88,46 % Realisasi Laporan Keuangan berjalan dengan baik
	<p>3) Urusan Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya tenaga staf dan sarana /prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> Di bagian umum pekerjaan semua telah berjalan baik

		dan lancar walaupun masih kekurangan staf dan sarana yang belum memadai
Bimbingan Narapidana/Anak Didik		
Bimbingan Narapidana/Anak Didik	<p>2) Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana / anak didik :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya Tenaga analisis dan tenaga medis serta peralatan pendukung belum ada • Petugas khusus di bidang Kerohanian baik Kristen maupun Islam belum ada • Kurangnya alat-alat yang dapat menunjang pekerjaan • Kurang Biaya perawatan Narapidana • Kurangnya sarana prasarana dan SDM pada program rehabilitasi sosial • Anjungan SDP Online Rusak 	<ul style="list-style-type: none"> • Di dalam pembinaan kegiatan yang telah berhasil Paket A,B,C Pembinaan mental rohani bagi warga binaan. Kegiatan pelatihan kepribadian rohani dan mental 157 orang WBP • Program Pembinaan PB,CMB dan CB berjalan baik dan masih perlu di tingkatkan • Melaksanakan program rehabilitasi sosial

Kegiatan Kerja

<p>Kegiatan Kerja</p>	<p>1. Bimbingan Kegiatan kerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurang adanya tempat untuk memasarkan hasil produksi • Tidak bisa bersaing dengan produksi luar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil – hasil karya yang di buat selama tahun 2023 yaitu: 2. Meja 3. Kursi 4. Lemari 5. Pondok Layanan Kunjungan 6. hari besar semuanya berjalan dengan baik dan telah berhasil 7. Penyetoran PNBP sudah dilaksanakan 8. Hasil karya dari Warga binaan yang di tampilkan atau di pamerkan pada saat hari-
------------------------------	---	---

Seksi Keamanan dan Tata tertib		
Keamanan dan Tata Tertib	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu penambahan sarana pengamanan berupa: Senjata Api, tongkal strom, Borgol tangan / jari, X-Ray dan Gembok • Sarana dan prasarana pendukung kurang memadai • Belum tersedianya APAR 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan selama tahun 2023 berjalan dengan baik, aman dan lancar walaupun ada kendala-kendala yang di hadapi • Dengan sarana dan prasarana yang ada, bisa melaksanakan tugas dengan baik dan lancar selama tahun 2023. • Tidak adanya alat pemadam kebakaran seperti APAR

B. REALISASI ANGGARAN

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan realisasi anggaran yang disusun oleh suatu entitas akan menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Realisasi penyerapan semester II

tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura merupakan wujud dari pengawasan langsung dalam rangka penyerapan anggaran sekaligus sebagai perwujudan pemenuhan akuntabilitas publik.

Persentase realisasi anggaran Semester II pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura dalam menangani Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI sebesar 99% dengan rincian Realisasi Belanja Pegawai sebesar 100% dan realisasi Belanja Barang sebesar 99%.

ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2022 - 2023

PAGU TAHUN 2022

DIPA Sebesar Rp. 12.910.937.000

URAIAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL
Pagu	Rp. 5.115.198.000	Rp. 7.645.741.000	Rp. 150.000.000
Realisasi	Rp. 5.098.257.887	Rp. 7.504.758.938	Rp. 149.893.290
Sisa Anggaran	Rp. 16.938.113	Rp. 140.982.062	Rp. 106.710
Persentase	100%	98%	100%

Total Realisasi Anggaran = Rp. 12.752.910.115 (99%)

Sisa Anggaran = Rp. 158.026.885



**ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI
TAHUN 2022 - 2023**

**PAGU
TAHUN 2023**

DIPA Sebesar Rp. 12.986.535.000

URAIAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL
Pagu	Rp. 5.116.919.000	Rp. 7.517.944.000	Rp. 351.672.000
Realisasi	Rp. 5.105.899.885	Rp. 7.453.607.756	Rp. 351.672.000
Sisa Anggaran	Rp. 11.019.135	Rp. 64.341.244	0
Persentase	100%	99%	100%
<i>Total Realisasi Anggaran = Rp. 12.911.174.621 (99%)</i>			
<i>Sisa Anggaran = Rp. 75.360.379</i>			

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

C.1 Laporan Realisasi Anggaran

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERTUJUK KINERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR DI DESEMBER 2022
(DILAKUKAN RUMAH)**



KEMENTERIAN KEHAKIMATAN REPUBLIK INDONESIA
 LAPAS KLASA II JAYAPURA
 JALAN KEMENTERIAN KEHAKIMATAN REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN KEHAKIMATAN REPUBLIK INDONESIA

URAIAN	2022			2023		
	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi (%)	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
1. Pengeluaran Pegawai (Rp. Miliar)						
1.1. Gaji dan Tunjangan						
1.2. Biaya Perjalanan Dinas						
1.3. Biaya Penghasilan Pegawai						
2. Pengeluaran Barang dan Jasa (Rp. Miliar)						
2.1. Pengeluaran Barang dan Jasa (Rp. Miliar)						
2.2. Pengeluaran Jasa (Rp. Miliar)						
2.3. Pengeluaran Sewa (Rp. Miliar)						
2.4. Pengeluaran Lain-lain (Rp. Miliar)						
3. Pengeluaran Modal (Rp. Miliar)						
Total Pengeluaran Anggaran (Rp. Miliar)						
1. Gaji dan Tunjangan						
1.1. Gaji dan Tunjangan						
1.2. Biaya Perjalanan Dinas						
1.3. Biaya Penghasilan Pegawai						
1.4. Biaya Lain-lain						
1.5. Biaya Sewa						
1.6. Biaya Lain-lain						
1.7. Biaya Lain-lain						
1.8. Biaya Lain-lain						
1.9. Biaya Lain-lain						
1.10. Biaya Lain-lain						
1.11. Biaya Lain-lain						
1.12. Biaya Lain-lain						
1.13. Biaya Lain-lain						
1.14. Biaya Lain-lain						
1.15. Biaya Lain-lain						
1.16. Biaya Lain-lain						
1.17. Biaya Lain-lain						
1.18. Biaya Lain-lain						
1.19. Biaya Lain-lain						
1.20. Biaya Lain-lain						

LAPORAN KECERDAS ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DILAKUKAN RUPUK)



KEBANGSAAN BERTAMBAH
KESEHATAN BERTAMBAH
KEBERKHAIRAN BERTAMBAH

KEBANGSAAN BERTAMBAH
KESEHATAN BERTAMBAH
KEBERKHAIRAN BERTAMBAH

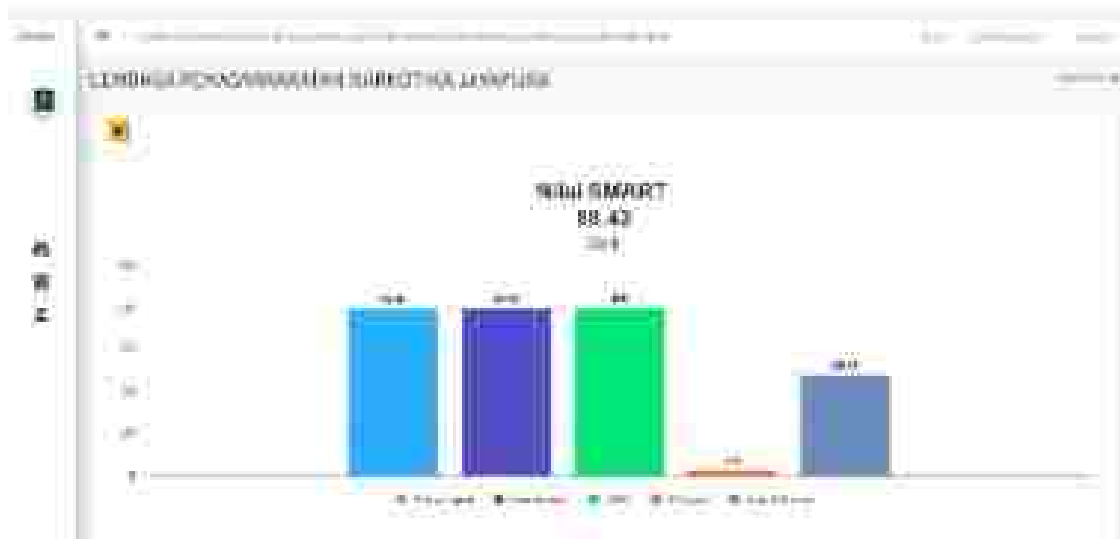
No. Buk. 00000000000000000000
No. Buk. 00000000000000000000
No. Buk. 00000000000000000000
No. Buk. 00000000000000000000

Kategori	2023			2022		
	REKORDED	REALISASI	PERSENTASE (RUPUK)	REKORDED	REALISASI	PERSENTASE (RUPUK)
1. Biaya Personal						
2. Biaya Perjalanan						
3. Biaya Transportasi						
4. Biaya Komunikasi						
5. Biaya Pemeliharaan						
6. Biaya Lain-lain						
7. Biaya Pemeliharaan Peralatan						
8. Biaya Pemeliharaan Gedung						
9. Biaya Pemeliharaan Jalan						
10. Biaya Pemeliharaan Perantara						
11. Biaya Lain-lain						
12. Biaya Pemeliharaan Gedung						
13. Biaya Pemeliharaan Jalan						
14. Biaya Pemeliharaan Perantara						
15. Biaya Lain-lain						
Jumlah Anggaran 2023	10.000.000	10.000.000	100,00%	10.000.000	10.000.000	100,00%
Jumlah Anggaran 2022						

Disusun oleh: [Nama] [Jabatan]
Tanggal: [Tanggal]

[Tanda Tangan]

C.2: Nilai Capaian SMART



C.3: Nilai IKPA



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENYAKITAN KLASISIA JAYAPURA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Periode: Bulan 01/2023

No	Kode IKPA	Kode SK	Kode Sub-Unit	Uraian Kinerja	Kategori	Kinerja Perencanaan Anggaran		Terdapat Pelaksanaan Anggaran (%)					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai TPA	Kategori Good	Nilai Akhir Saat Pengukuran Akhir
						Realisasi (%)	Terdapat Pelaksanaan (%)	Pelaksanaan Anggaran	Nilai Realisasi	Pelaksanaan Anggaran	Realisasi di Bawah	Realisasi Sesuai				
1	01	01	00000	Indikator Pelaksanaan Anggaran	000	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	000	Good	100.0
					000	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	000	Good	100.0
					000	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	000	Good	100.0
					000	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	000	Good	100.0
					000	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	000	Good	100.0

D. Capaian Kinerja Lainnya

1) Money Bapenas



2) E-Performance

The screenshot displays the E-Performance system interface, which is a web-based dashboard for monitoring and reporting performance metrics. The interface is organized into several sections:

- Header:** Features a navigation menu with options like "Home", "Dashboard", "Monitoring", "Reporting", "Settings", and "Help". A logo is visible on the left side.
- Dashboard:** The main area contains several data visualization components:
 - Summary Cards:** A row of three cards showing key performance indicators (KPIs) with numerical values and trend indicators (up/down arrows).
 - Table:** A large table with multiple columns, likely representing performance data for different units or departments. The table is partially obscured by a vertical green bar.
 - Charts:** A bar chart and a line chart are visible, showing performance trends over time.
- Footer:** Contains a page number and a copyright notice.

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura secara umum sudah menyelenggarakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah ditetapkan serta Realisasi Anggaran yang sangat minim dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 dengan penyerapan Anggaran sebesar 94,38 %

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian sasaran yang ditetapkan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura dan jajarannya berupaya meningkatkan koordinasi, meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas, mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia dan tetap melakukan pengawasan internal guna mendukung upaya keberhasilan kinerja untuk tetap mempertahankan penilaian BP berupa VTP (Wajib Tanpa Pengecualian).

2. SARAN DAN LANGKAH-LANGKAH KE DEPAN

Upaya pemecahan masalah atau kendala yang dihadapi perlu dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura: Merindaklanjuti kendala yang ditemui dalam proses pencapaian target kinerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura, berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kinerja instansi kedepannya:

1. Penguatan kompetensi SDM diberbagai bidang seperti bidang kehumasan (pelatihan), penafaan BMN, Administrasi dan Pelayanan, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam menghadapi era e-Government;
2. Membuat jejaringan kehumasan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura agar terjadi sinergitas diseminasi Infomasi;
3. Memperkuat peranan Social Media sebagai Platform yang efektif dan murah sebagai alat untuk mendiseminasikan informasi (capaian dan program kerja);
4. Peningkatan pelayanan litigasi dan non litigasi, pelayanan pembantuan pertimbangan hukum, serta pelayanan penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui e-LAPOR;
5. Membangun budaya kerja (corporate culture) yang responsif dan terukur;
6. Menginventarisasi permasalahan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura dalam pelaksanaan kinerja yang belum efisien, serta masih ada tugas dan fungsi yang tumpang tindih di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura;
7. Membangun/merumuskan sistem penilaian beban kerja dan perencanaan kebutuhan pegawai pada masing-masing Unit Sub Bagian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura;
8. Menyiapkan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan strategis, mengelola, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian, serta melaksanakan

pengelolaan dan pembinaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Menyusun rencana kebutuhan BMN yang disusun secara tepat sasaran dan akuntabel sesuai standar barang dan standar kebutuhan;
10. Pengamanan aset (tanah) Kementerian Hukum dan HAM di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura;
11. Meningkatkan komitmen antara Pengguna Barang dan pengelola Barang dalam pengelolaan BMN;
12. Melakukan evaluasi dan monitoring atas pengelolaan BMN di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura; dan
13. Menyusun rencana umum pengadaan barang/jasa secara tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Jayapura, 05 Januari 2024
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIA Jayapura



Samaludin Bogra
NIP. 196612161993031001

LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Lapas Narkotika Kelas IIA Jayapura
Tahun 2023

**DOKUMENTASI KEGIATAN
PADA LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023**

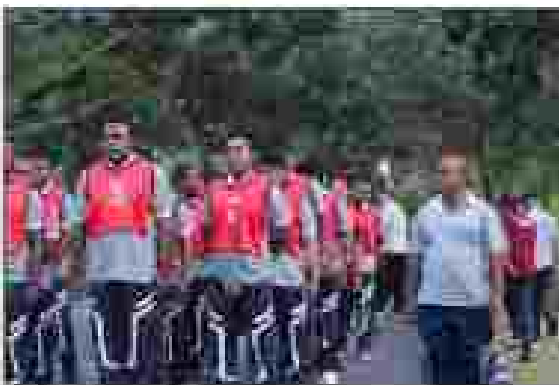
Kegiatan Penanda Tangan Janji Kinerja



Kegiatan Apel Rutin Pegawai (Pagi dan Sore)
Dan Apel Serah Terima Penjagaan



**Kegiatan Pembinaan Fisik, Mental, dan Disiplin Pegawai
Bekerjasama dengan Dodik Bela Negara Rindam XVII/Cenderawasih**



KEGIATAN KEPRIBADIAN NARAPIDANA

KEGIATAN KEAGAMAAN



Sosialisasi Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat



Pelatihan Kemandirian WBP

Pelatihan Meubel dan Lass penandatanganan MOU dengan Balai Latihan Kerja dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura



Kegiatan Olahraga WBP



Kegiatan Penggeledahan Blok Hunian Serta Tes Urine Warga Binaan



Kegiatan Pemberian Remisi Kemerdekaan



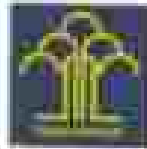
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL TAHUN 2023



PEMERIKSAAN KESEHATAN KEPADA WBP



**DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA JAYAPURA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASTYANAKAN NARKOTIKA KELAS IIA JAYAPURA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan visi misi pemerintah yang efektif, tanggap dan akuntabel serta menghormati nilai-nilai, kami yang berkedudukan sebagai Pihak Kedua

Nama : Semendji Bogra
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Anthonius Mathias Ayorboba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Sebelum ditandatangani, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama setuju akan melaksanakan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan kebijakan dan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil inisiatif yang diperlukan dalam rangka penertiban pelaksanaan dan tindak.

Jayapura, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Papua

Anthonius Mathias Ayorboba
NIK: 753455181982101001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIA Jayapura

Semendji Bogra
NIK: 75001218188821001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEKASABARAKATAN NARKOTIKA KELAS IA JAYAPURA
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Kul bertepatan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarabataan	75
2	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	77,5
3	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kualitas dalam pemerintahan ekonomi nasional	Persentase menuntunya masalah	75

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarabataan yang Berualitas	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Layanan Pemasarabataan Indeks Patisipasi Masyarakat Pemasarabataan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarabataan Indeks Partisipasi Dengan Keselamatan Masyarakat, Anak, dan Tahanan 	<ol style="list-style-type: none"> 80 80 80 78
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarabataan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Bendah Silakan dan Barang Rampasan Negara, Masyarakat, Anak, dan Klien Pemasarabataan	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Keterbacaan Pembinaan Masyarakat Indeks Pemenuhan Hak Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 50 60
3	Terwujudnya	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT	75

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
15	(B)	(C)	(D)
	Penyenggaraan Penyelenggaraan yang Aman dan Tertib	Penyelenggaraan	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
16	(B)	(C)	(D)
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengidap Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkoba di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai standar 2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan preventif secara keseluruhan 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dasar teratasi 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/lansia berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (ditinjau jumlah virusnya) dan TB Postif (berhasil sembuh) 8. Persentase penurunan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan/terpapar penyalahgunaan narkoba 	<p>75%</p> <p>85%</p> <p>90%</p> <p>70%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>70%</p> <p>25%</p>
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pemulihan Vokal, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Risiko Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan 5. Persentase Narapidana risiko tinggi yang berubah penakutnya menjadi Saah, Patuh dan Opatif 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan 	<p>85%</p> <p>98%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>15%</p> <p>25%</p>

		vokasi bersertifikasi	
		7. Persentase pendapatan yang bekerja dan produktif	87%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Keselamatan di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtibmas yang dapat dipegang	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap lra tertb cch Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtibmas	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtibmas secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Sumber	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT, Pemasyawarakan dan pelaksanaan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMH dan kerumah tanggian	1 Layanan
		3. Terselenggaranya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemerintahan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Penunjtanan	1 Layanan
		6. Jumlah kendaraan bermotor	0 Unit
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	6 Unit
		8. Jumlah perlatan dan fasilitas pertamanan	11 Unit
		9. Jumlah gedung/ bangunan	0 Unit

Revisi	Revisi
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 6.810.500.000,-
Penyelenggaraan/Pemasyarakatan di Pelayan	Rp. 6.810.500.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 7.138.182.000,-
Dukungan Manajemen dan Tenaga Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 7.138.182.000,-

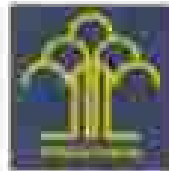
Jayapura, 3 Januari 2023

Pratik Widada,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Papua


Pratik Widada Ayotela
NIP. 1961021919803001001

Pitak Perdana,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IA Jayapura


Pitak Perdana
NIP. 1966122019803001001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAYAPURA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berlandaskan target dibawah ini :

Nama : Samaludin Bogas
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura

berpanglima akan mewujudkan target kinerja yang sebelumnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

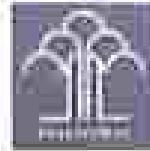
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Jayapura, 3 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIA Jayapura

Samaludin Bogas
NIP. 1960121419830031001

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA JAYAPURA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAYAPURA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bairakuth Bogga
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jayapura

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Antonius Mathus Ayomaba
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua

Selaku mitra pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama setuju akan mewujudkan target kinerja yang seluruhnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan untuk akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Papua

Antonius Mathus Ayomaba
NIP. 19730115 1999 05 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIA Jayapura

Bairakuth Bogga
NIP. 19601215 199003 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A JAYAPURA
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rol berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban (JPT) Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase minimnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85
		2. Indeks Perilaku dan Kinerja Pemasyarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85
		4. Indeks Persepsi Tingkat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pemidanaan Narapidana	86
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	82,6

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
10	RI	RI	100%
3	Tercapainya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
10	RI	RI	100%
1	Meningkatnya Pelayanan Pembebasan Narapidana/Tahanan/Anak Pengidapa Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkoba di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pembebasan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai standar 2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 4. Persentase tahanan/hampidana biasa yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase tahanan/narapidana/Anak membutuhkan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (dilihat jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 7. Persentase perubahan kualitas hidup pendaftar yang menggunakan pernyataan narapidana 	<p>60%</p> <p>94%</p> <p>80%</p> <p>85%</p> <p>85%</p> <p>80%</p> <p>27%</p>
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pendidikan, Vokasi, Perbaikan dan Peningkatan Narapidana Risiko Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan 5. Persentase Narapidana risiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sedar, Paham dan Dapat 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi 	<p>70%</p> <p>99%</p> <p>85%</p> <p>80%</p> <p>17%</p> <p>31%</p>

		7. Persentase rampidana yang selesai dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtibmas yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtibmas	85%
		4. Persentase pemulhan kondisi keamanan pasca gangguan kamtibmas secara huntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Data	1. Tersedianya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akurat/tabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersedianya dokumen pengelolaan BMN dan Konsumen tanggapan	1 Layanan
		3. Terperutinya data dan peringkat kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	6 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	32 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	9 Unit
		9. Jumlah Gedung/Sangunan	21 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 6.266.055.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 6.266.055.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.780.182.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya LPT Pemasyarakatan	Rp. 6.780.182.000,-

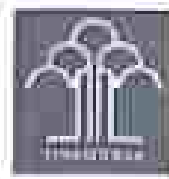
Jayapura, 23 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Papua

Antonius Wainik Ayorbaba
NIP. 19710515 199510 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas IIa Jayapura

Samsudjo Bogra
NIP. 19651226 198303 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A JAYAPURA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK PAPUA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, beranda target dibawah ini:

Nama : Samudun Bogra
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jayapura

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebertersediaan dan kengujian pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 23 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas II A Jayapura

Samudun Bogra
NIP. 19881210 199303 1 001